

## Daftar Pustaka

- Bahir Mukhammad, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022, h. 1.
- Benny K. Harman, *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi: Sejarah Pemikiran Pengujian UU Terhadap UUD*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2013, h. 22.
- C F. Strong, *Konstitusi Politik Modern Lembaga Legislatif*, Derta Sri Widowatie, (Ttp: NUSAMEDIA, 2021), h. 1.
- “Contoh Asas kepastian Hukum” <https://databook.id/contoh-asas-kepastian-hukum/>, diakses pada 8 Juni 2024, pukul 09.04 WIB.
- Cekli Setya Pratiwi, dkk., (ed.) *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik* (Jakarta: Lelp, 2018), h. 78.
- Evi Oktarina, *Kewenangan Legislatif dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta: Deepublish, 2022, h. 5.
- Fandi Purnama dan Muhammad syuib, “Kriteria Calon Anggota Legislatif”, dalam *AS-SIYADAH: Jurnal politik dan Hukum Tata Negara*, Vol. 1, No. 1 (September 2022), h. 76-77.
- “HukumOnline.com” <https://www.hukumonline.com/berita/a/minat-menjadi-caleg-2024-begini-syaratnya-menurut-undang-undang-1t634fc4a422828/?page=all#!>, diakses pada 6 Maret 2024, pukul 22.31 WIB.
- Joanedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empriris*, Jakarta: Kencana, 2018, cetakan kedua, h. 234.
- “Kepastian Hukum: Pengertian, Tujuan, Asas dan Contoh” <https://hotelier.id/studi/kepastian-hukum/>, diakses pada 7 Juni 2024, pukul 12.00 WIB.

“Kriteria calon Anggota Legislatif Sadar HAM pada Pemilu 2024”  
[https://www.komnasham.go.id/files/20230510-keterangan-pers-nomor-28-hm-00-\\$RPV.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20230510-keterangan-pers-nomor-28-hm-00-$RPV.pdf), dikases pada 11 Juli 2024, pukul 12.00 WIB.

Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h. 2

Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, h. 113-114.

Mario Julyono dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum”, dalam *CREPIDO: Filsafat dan Ilmu Hukum* Vol. 1, No. 01 (Juli 2019), h. 15.

Nita Anggraeni, “Pengantar Ilmu Hukum (PIH) dan Pengantar Tata Hukum Indonesia (PHTI)”, (Ttp: tt), h.12-13.

PMK REBUBLIK INDONESIA Nomor 87/PUU-XX/2022.

“Pengertian dan Kasus Asas Kepastian Hukum”  
[https://www.kompasiana.com/alyarahmahsita8827/650eaa594adde3a3c7604a2/pengertian-dan-kasus-asas-kepastian-hukum?page=all#google\\_vignette](https://www.kompasiana.com/alyarahmahsita8827/650eaa594adde3a3c7604a2/pengertian-dan-kasus-asas-kepastian-hukum?page=all#google_vignette), diakses pada 7 Juni 2024, pukul 12.00 WIB.

“Pengertian Prosedur Menurut Para Ahli dan Macamnya Serta Cirinya Secara Umum” <https://www.ilmuips.my.id/2020/08/pengertian-prosedur.html>, dikases pada 15 Juli 2024, pukul 08.00 WIB.

“Pengertian Prosedur” [https://repository.uin-suska.ac.id/14742/8/8.%20BAB%20III\\_2018401EI.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/14742/8/8.%20BAB%20III_2018401EI.pdf), diakses pada 22 Juli 2024, pukul 22.12 WIB.

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, cetakan ketigabelas, h. 93.
- Robert E. Goodin, *Organisasi Legislatif Demokratis*, Irfan M Zaki, (Ttp: NUSAMEDIA, 2021), h. 1.
- R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil”, Vol. 13 No. 02 (Juni 2016), h. 5-6.
- Siti Halilah dan Mhd. Fakhrurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, dalam *SIYASAH: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 2 (Desember 2021), h. 59-60.
- “Syarat Menjadi Caleg Menurut Undang-Undang”  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/minat-menjadi-caleg-2024-begini-syaratnya-menurut-undang-undang-1t634fc4a422828/?page=3>, diakses pada 14 Juli 2024, pukul 22.00 WIB.
- Tata Wijayanta “Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Kemafaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga” *Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2 (Mei 2014), h. 6.
- Utami Puspaningsih, “Tiga Aliran Konvensional Tentang Tujuan Hukum”, (Ttp: Arsip Artikel, 2022), h. 1.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), h. 106.